

BAB II

KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

2.1 Model Penelitian Terdahulu

Gonzales dan Meca (2013) melakukan penelitian atas pengaruh tata kelola perusahaan terhadap manajemen laba di Amerika Latin. Sampel perusahaan sebanyak 435 perusahaan non-keuangan dengan periode penelitian tahun 2006 sampai dengan 2009. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini berupa struktur kepemilikan yang terdiri dari kepemilikan manajerial, konsentrasi kepemilikan, kepemilikan keluarga, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, ukuran komisaris independen, aktivitas dewan, dan indeks pemerintah. Variabel kontrol terdiri dari skala perusahaan, *leverage*, *Return on Assets (ROA)*, dan pertumbuhan penjualan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan terhadap manajemen laba dengan menggunakan pengukuran akrual diskresioner. Model Pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan manajerial, konsentrasi kepemilikan, kepemilikan keluarga, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, ukuran komisaris independen, aktivitas dewan, dan indeks pemerintah disajikan pada Gambar 2.1 di bawah ini.



Gambar 2.1 Model pengaruh kepemilikan manajerial, konsentrasi kepemilikan, kepemilikan keluarga, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, ukuran komisaris independen, aktivitas dewan, dan indeks pemerintah terhadap manajemen laba, sumber: Gonzales dan Meca, 2013.

Alves (2012) melakukan penelitian tentang struktur kepemilikan dan hubungannya dengan manajemen laba pada perusahaan yang terdaftar di Portugis. Sampel penelitian sebanyak 34 perusahaan non-keuangan dengan periode penelitian tahun 2002 sampai dengan 2007. Variabel independen yang digunakan berupa kepemilikan manajerial, konsentrasi kepemilikan dan kepemilikan

institusional. Variabel kontrol terdiri dari arus kas operasional, ukuran dewan komisaris, skala perusahaan, kinerja perusahaan, dan *leverage*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa keefektifan struktur kepemilikan suatu perusahaan dalam mengawasi tindak manajemen laba dilakukan. Model pengaruh kepemilikan manajerial, konsentrasi kepemilikan, dan kepemilikan institusional disajikan pada Gambar 2.2.

Gambar 2.2 Model pengaruh kepemilikan manajerial, konsentrasi kepemilikan, dan kepemilikan institusional terhadap manajemen laba, sumber: Alves, 2012.

Saleh, Iskandar dan Rahmat (2005) melakukan penelitian atas pengaruh keefektifan karakteristik dewan dalam mengawasi perlakuan manajemen

melakukan praktek manajemen laba. Penelitian ini menggunakan dualitas CEO, ukuran komisaris independen dan ukuran dewan komisaris.

Ali, Salleh dan Hassan (2008) melakukan penelitian hubungan yang terjadi antara struktur kepemilikan dan manajemen laba pada perusahaan yang terdaftar Bursa Malaysia dengan periode penelitian tahun 2002 sampai dengan 2003. Variabel independen yang digunakan adalah ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, kepemilikan individu, kepemilikan institusional, kepemilikan perusahaan afiliasi, kepemilikan asing, *Return on Assets* (ROA), arus kas operasional, *leverage*, kualitas audit, dan skala perusahaan.

Johari, Saleh, Jaffar, dan Hassan (2008) melakukan penelitian tentang pengaruh komisaris independen, kompetensi mekanisme tata kelola perusahaan dan kepemilikan terhadap manajemen laba pada 234 perusahaan yang terdaftar di Bursa Malaysia. Variabel independen yang digunakan adalah komisaris independen, dualitas CEO, kompetensi komisaris, pengalaman komisaris, dan kepemilikan manajerial.

Shah, Zafar dan Durrani (2009) melakukan penelitian atas hubungan komposisi dewan terhadap manajemen laba pada perusahaan yang terdaftar di *Karachi Stock Exchange* di Pakistan. Sampel yang digunakan sebanyak 120 perusahaan dengan periode penelitian tahun 2003 sampai dengan 2007. Variabel independen yang digunakan adalah ukuran komisaris independen dan kepemilikan institusional.

Yang, Chun, dan Ramadili (2009) melakukan penelitian tentang pengaruh struktur dewan dan struktur kepemilikan institusional terhadap

manajemen laba. Objek penelitian sebanyak 613 perusahaan sepanjang periode 2001 sampai dengan 2003 di Malaysia. Variabel independen yang digunakan adalah direksi non-eksekutif dan kepemilikan institusional.

Al-Fayoumi, Abuzayed, dan Alexander (2010) melakukan penelitian tentang pengaruh struktur kepemilikan terhadap manajemen laba pada perusahaan yang terdaftar dalam *Amman Stock Exchange* di Jordania. Sampel perusahaan sebanyak 195 perusahaan dengan periode penelitian tahun 2001 sampai dengan 2005. Variabel penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan *block-holders external*, dan kepemilikan *block-holders* institusional.

Mitani (2010) melakukan penelitian atas pengaruh tata kelola perusahaan terhadap manajemen laba pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Tokyo di Jepang. Sampel penelitian sebanyak 799 perusahaan dengan periode penelitian tahun 1999 sampai dengan 2004. Variabel independen yang digunakan adalah kepemilikan manajerial, konsentrasi kepemilikan, insentif direksi, kepemilikan institusi finansial, kepemilikan institusional, kepemilikan individual, dan kepemilikan asing.

Abdoli (2011) melakukan penelitian tentang hubungan antara ukuran dewan komisaris dan konsentrasi kepemilikan terhadap manajemen laba pada perusahaan yang terdaftar di *Tehran Stock Exchange* di Iran. Sampel yang diteliti sebanyak 435 perusahaan dengan periode penelitian sepanjang tahun 2005 sampai dengan 2010. Variabel independen yang digunakan adalah ukuran dewan komisaris dan konsentrasi kepemilikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk

mengetahui pengaruh atas kinerja dewan komisaris dalam pengawasannya terhadap praktek manajemen laba.

Gumanti dan Prasetiawati (2011) melakukan penelitian atas dualitas CEO, tata kelola perusahaan dan manajemen laba pada saat penawaran saham perdana di Indonesia. Objek penelitian sebanyak 60 perusahaan di Indonesia. Variabel independen yang digunakan adalah dualitas CEO, jumlah dewan, ukuran dewan komisaris, skala perusahaan, *leverage*, dan profitabilitas.

Jing, Yan, Xiu, dan Lin (2011) melakukan penelitian atas pengaruh struktur kepemilikan terhadap manajemen laba pada perusahaan di China. Variabel independen yang digunakan adalah kompensasi direksi, konsentrasi kepemilikan, ukuran dewan komisaris, ukuran komisaris independen dan dualitas CEO. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa mekanisme tata kelola perusahaan melalui konsentrasi kepemilikan terhadap praktek manajemen laba.

Kouki, Elkhaldi, Atri, dan Souid (2011) melakukan penelitian atas pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan terhadap manajemen laba pada perusahaan di Amerika Serikat. Sampel perusahaan sebanyak 171 perusahaan dengan periode penelitian tahun 1998 sampai dengan 2005. Variabel independen yang digunakan adalah ukuran dewan komisaris, dualitas CEO, komite audit independen, CEO sebagai anggota komite nominasi, dan kepemilikan manajerial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan terhadap manajemen laba.

Nugroho dan Eko (2011) mengadakan penelitian atas karakteristik dewan terhadap manajemen laba pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia sepanjang tahun 2004 hingga 2008. Variabel independen yang digunakan adalah ukuran dewan komisaris, dualitas CEO, jumlah dewan, dan kepemilikan manajerial.

Roodposhti dan Chashmi (2011) menganalisa pengaruh atas mekanisme tata kelola perusahaan terhadap manajemen laba di 196 perusahaan yang terdaftar di *Tehran Stock Exchange*. Variabel independen yang digunakan berupa konsentrasi kepemilikan, ukuran dewan komisaris, dominasi CEO, dan kepemilikan institusional.

Abed, Al-Attar, dan Suwaidan (2012) melakukan penelitian atas pengaruh tata kelola perusahaan terhadap manajemen laba. Objek penelitian dilakukan pada 329 perusahaan yang terdaftar *Amman Stock Exchange* sepanjang tahun 2006-2009. Variabel independen yang digunakan berupa ukuran dewan komisaris, jumlah dewan komisaris, dualitas CEO, dan konsentrasi kepemilikan.

Shaikh, Iqbal, dan Shah (2012) melakukan penelitian atas pengaruh kepemilikan institusional terhadap manajemen laba pada perusahaan yang terdaftar di *Karachi Stock Exchange* (KSE) di Iran. Sampel pada penelitian ini sebanyak 68 perusahaan non-finansial dengan periode penelitian tahun 2006 sampai dengan 2010. Variabel independen yang digunakan berupa kepemilikan institusional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menginvestigasi dan melihat sejauh mana kepemilikan institusional efektif dalam menekan praktek manajemen laba yang dimanipulasi ke arah negatif.

Usman dan Yero (2012) melakukan penelitian atas konsentrasi kepemilikan dan praktek atas manajemen laba pada perusahaan di Nigeria.

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsentrasi kepemilikan.

Al-Zyoud (2012) menganalisa atas dampak direksi independen dan struktur kepemilikan terhadap manajemen laba pada perusahaan di Inggris. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini berupa ukuran komisaris independen, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial.

Sukeecheep, Yarram, dan Farooque (2013) melakukan penelitian atas karakteristik dewan dan manajemen laba di Thailand. Variabel independen yang digunakan berupa *board interlocking*, jumlah dewan, ukuran dewan komisaris, aktivitas dewan, dan dualitas CEO.

Swastika (2013) melakukan penelitian atas tata kelola perusahaan dan skala perusahaan terhadap manajemen laba pada 57 perusahaan yang bergerak dalam bidang makanan di Indonesia. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini berupa skala perusahaan, ukuran dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, dan kualitas audit.

2.2 Manajemen Laba

Scott (2003) mendefinisikan manajemen laba dengan tindakan yang dilakukan melalui pilihan kebijakan akuntansi untuk memperoleh tujuan tertentu, misalnya untuk memenuhi kepentingan sendiri atau meningkatkan nilai pasar perusahaan mereka. Dimana manajemen laba menghasilkan pelaporan keuangan yang tidak netral yang di dalamnya manajer secara intensif melakukan campur tangan untuk menghasilkan beberapa keuntungan pribadi. Manajer dapat

melakukan campur tangan dengan memodifikasi tentang bagaimana mereka menginterpretasikan berbagai standar akuntansi keuangan dan data akuntansi (Healy & Wahlen,1999).

Healy dan Wahlen (1999) memberikan beberapa contoh teknik mengenai cara manajer dalam melakukan campur tangan atas laporan keuangan. Pertama, dengan adanya kebebasan dalam memilih metode akuntansi yang ada, manajer dapat melakukan penilaian (*judgment*) yang diperlukan untuk mengestimasi jumlah atas beberapa kejadian ekonomi yang terefleksi dalam laporan keuangan antara lain: estimasi tingkat piutang tidak tertagih, estimasi kurun waktu depresiasi aset tetap atau amortisasi aset tidak berwujud, estimasi biaya garansi, dan kejadian ekonomi lainnya.

Aspek kedua adalah untuk menunjukkan bahwa tujuan dari manajemen laba adalah untuk mengubah paradigma atau bahkan menyesatkan para pemegang saham tentang kinerja finansial suatu perusahaan. Hal ini terjadi ketika manajer memiliki akses informasi yang lebih banyak terhadap internal perusahaan dan kejadian di dalamnya. Sebaliknya, para pemegang saham tidak memiliki data yang tersedia untuk mengetahui informasi mengenai perusahaan tersebut.

Pada akhirnya, untuk merealisasikan kedua aspek di atas, manajer dalam penilaiannya untuk membuat suatu laporan keuangan memicu munculnya biaya dan keuntungan. Biaya yang dimaksud adalah alokasi biaya yang secara potensial muncul atas penerapan manajemen laba. Sementara keuntungan adalah peningkatan yang terjadi dalam penyampaian komunikasi dari pihak manajemen terhadap pihak luar atau pihak pemegang saham.

Menurut Hashemi dan Rabiee (2011), Kothari *et al.* (2012), dan Soumehsaraei dan Jafarpour (2013) manajemen laba dapat diimplementasikan melalui dua cara oleh manajer. Metode pertama berupa manipulasi secara akrual. Metode ini tidak memiliki pengaruh langsung terhadap arus kas perusahaan. Dalam metode manajemen laba melalui manipulasi akrual, aktivitas operasional tidak dimanipulasi namun hasil atas kinerja aktivitas perusahaan dilaporkan secara tidak wajar.

Strategi manajemen laba dengan pemilihan metode akuntansi dan pengaturan waktu transaksi mempengaruhi manajemen laba dengan proksi *discretionary accruals* (akrual diskresioner). Semakin besar manajemen laba dengan menggunakan strategi pemilihan metode dan pengaturan waktu transaksi semakin besar pula manajemen laba.

Metode kedua berupa manipulasi secara nyata/riil. Aktivitas manipulasi riil dapat menyebabkan tingkat laba sesuai dengan yang ditargetkan. Manajer dalam hal ini memanipulasi beberapa aktivitas perusahaan yang memiliki pengaruh secara langsung terhadap arus kas yang pada akhirnya akan mempengaruhi besarnya laba.

Islam, Ali, dan Ahmad (2011) berpendapat bahwa kemungkinan akan dilakukannya manajemen laba dalam laporan keuangan dapat dideteksi melalui penggunaan akrual. Jumlah akrual yang tercermin dalam perhitungan atas laba terdiri dari akrual diskresioner dan non-akrual diskresioner. Dalam manajemen laba, akrual merupakan dasar perubahan atas terjadinya kebijakan manajemen,

sehingga dapat dikatakan bahwa akrual diskresioner mewakili intervensi atas laporan keuangan yang dilakukan oleh pihak manajerial.

Komponen akrual termasuk segala bentuk penyesuaian atas pencatatan *cash basis* ke dalam *accrual basis*, termasuk di dalamnya adalah alokasi, provisi, atau perubahan metode akuntansi. Misalnya, terdapat penyisihan piutang tak tertagih yang diubah atas keputusan manajemen, perubahan tersebut yang didefinisikan sebagai akrual diskresioner. Sedangkan non-akrual diskresioner merupakan perubahan akrual yang terjadi tanpa melakukan penambahan atau perubahan atas komponen-komponennya.

Pada hakekatnya praktik manajemen laba menyebabkan reliabilitas dari laba tereduksi, karena di dalam manajemen laba terdapat pembiasan pengukuran laba sehingga pelaporan laba menjadi tidak seperti yang seharusnya dilaporkan. Perilaku manajemen laba dapat dijelaskan melalui *Positive Accounting Theory* (PAT) dan *Agency Theory*.

Tiga hipotesis PAT dijadikan dasar pemahaman tindakan manajemen laba yang dirumuskan oleh Watts dan Zimmerman (1986) adalah:

1. *The Bonus Plan Hypothesis*

Para manajer yang bekerja pada perusahaan yang menerapkan rencana bonus akan berusaha mengatur laba yang dilaporkannya dengan tujuan dapat memaksimalkan jumlah bonus yang akan diterimanya. Manajer perusahaan akan lebih memilih metode akuntansi yang dapat menggeser laba dari masa depan ke masa kini sehingga dapat menaikkan laba saat ini.

2. *The Debt to Equity Hypothesis (Debt Covenant Hypothesis)*

Hipotesis ini menyatakan bahwa semakin dekat suatu perusahaan kepada waktu pelanggaran perjanjian utang maka para manajer akan cenderung untuk memilih metode akuntansi yang dapat memindahkan laba periode mendatang ke periode berjalan dengan harapan dapat mengurangi kemungkinan perusahaan mengalami pelanggaran kontrak utang. Pada perusahaan yang mempunyai rasio *debt to equity* atau rasio hutang yang tinggi, manajer perusahaan cenderung menggunakan metode akuntansi yang dapat meningkatkan pendapatan atau laba. Perusahaan dengan rasio hutang yang tinggi akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana tambahan dari pihak kreditur bahkan perusahaan terancam melanggar perjanjian utang.

3. *The Political Cost Hypothesis (Size Hypothesis)*

Hipotesis ini menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan dengan skala besar dan industri strategis cenderung untuk menurunkan laba guna mengurangi tingkat visibilitasnya terutama saat periode kemakmuran yang tinggi. Upaya ini dilakukan dengan harapan memperoleh kemudahan serta fasilitas dari pemerintah. Biaya politik muncul dikarenakan profitabilitas perusahaan yang tinggi dapat menarik perhatian media dan konsumen.

Manajemen bisa menggunakan beragam pola manajemen laba. Beberapa

pola tersebut adalah (Scott, 2003):

1. *Taking a Bath*

Pola ini terjadi apabila kondisi suatu perusahaan berada pada titik lemah, atau pada masa re-organisasi perusahaan dan pada saat pergantian CEO. Bila perusahaan harus melaporkan laba yang tinggi, maka manajemen akan memaksakan untuk melaporkan laba yang lebih besar. Konsekuensinya manajer akan menghapus aset dengan harapan laba yang akan datang dapat meningkat. Bentuk ini mengakui adanya biaya pada periode yang akan datang sebagai kerugian pada periode berjalan, ketika kondisi buruk yang tidak menguntungkan tidak dapat dihindari pada periode tersebut.

2. *Income minimization*

Pola ini mirip dengan “*taking a bath*”, yakni dilakukan sebagai alasan politis pada periode laba yang tinggi dengan mempercepat penghapusan aset tetap dan aset tidak berwujud dan mengakui pengeluaran-pengeluaran sebagai biaya. Pada saat profitabilitas perusahaan sangat tinggi dengan maksud agar tidak mendapat perhatian secara politis, kebijakan yang diambil dapat berupa penghapusan atas barang modal dan aset tak berwujud, biaya iklan dan pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan, hasil akuntansi untuk biaya eksplorasi.

3. *Income maximization*

Income maximization adalah memaksimalkan laba yang dilaporkan agar memperoleh bonus yang lebih besar, *income maximization* dilakukan pada saat laba mengalami penurunan. Kecenderungan manajer untuk

memaksimalkan laba juga dapat dilakukan pada perusahaan yang melakukan suatu pelanggaran perjanjian utang.

4. *Income Smoothing*

Income smoothing dilakukan perusahaan dengan cara meratakan laba yang dilaporkan sehingga dapat mengurangi fluktuasi laba yang terlalu besar karena pada umumnya investor lebih menyukai laba yang relatif stabil.

Definisi, teori, teknik, dan pola di atas sepakat pada hal intensi manajerial yang merupakan prasyarat akan terjadinya manajemen laba. Namun, apakah intensi manajemen ini bersifat oportunistik adalah permasalahan yang berbeda. Beberapa penjelasan dalam manajemen laba juga digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan informasi kepada investor, dalam hal ini manajemen laba bisa jadi dianggap tidak oportunistik (Dechow & Skinner, 2000), dan (Scott, 2003).

2.3 Tata Kelola Perusahaan

Tata kelola perusahaan muncul karena terjadi pemisahan antara kepemilikan dengan pengendalian perusahaan atau seringkali dikenal dengan istilah masalah keagenan. Permasalahan keagenan dalam hubungannya antara pemilik modal dengan manajer adalah sulitnya pemilik dalam memastikan bahwa dana yang ditanamkan tidak diambil alih atau diinvestasikan pada proyek yang tidak menguntungkan sehingga tidak mendatangkan tingkat pengembalian, oleh

karena itu dibutuhkan tata kelola perusahaan untuk mengurangi permasalahan keagenan antara pemilik dan manajer (Jensen & Meckling, 1976).

Tata kelola perusahaan pertama kali diperkenalkan oleh *Cadbury Committee* tahun 1992 yang pada saat itu memusatkan perhatiannya pada rendahnya tingkat kepercayaan atas laporan keuangan dan kemampuan auditor untuk menyediakan penilaian yang benar, tepat, dan aman untuk para pemakai informasi laporan keuangan. Dengan dibentuknya *Cadbury Committee* menghasilkan sebuah produk tata kelola perusahaan yang didefinisikan sebagai sebuah sistem dimana perusahaan dapat diatur dan diawasi yang melibatkan para pemegang saham, manajer, kreditur, pemerintah, karyawan serta pemilik baik internal maupun eksternal perusahaan menjalankan kewajiban dan haknya dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) mendefinisikan tata kelola perusahaan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan guna memberikan nilai tambah pada perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan kepentingan para pemegang saham lainnya berdasarkan peraturan perundangan-undangan dan norma yang berlaku.

Menurut forum tata kelola perusahaan di Indonesia terdapat dua sistem manajemen yang berbeda yang membedakan mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris. *One-tier system* atau sistem satu tingkat banyak dianut oleh negara yang cenderung mengikuti hukum *anglo-saxon (common law)*,

sedangkan *two-tier system* atau sistem dua tingkat banyak diterapkan di negara-negara Eropa dan Asia yang menganut *civil law*, termasuk Indonesia.

One-tier system merupakan sistem dimana peran dewan komisaris (pengawas) dan peran dewan direksi (pelaksana/eksekutif) dijadikan dalam satu kesatuan yang disebut dengan *board of directors*. Penyatuan ini membuat tidak jelasnya peran dari pengawas dan pelaksana, sedangkan di dalam *two-tier system*, presiden direktur (CEO, *chief executive* atau *managing director*) mengetuai dewan eksekutif dan presiden komisaris mengetuai dewan pengawas. Kedua posisi ini selalu dipegang oleh dua orang berbeda.

Penerapan *two-tier system* dapat dilihat dengan jelas adanya perbedaan antara fungsi pengambilan dan pelaksanaan kebijakan dengan fungsi pengawasan. Fungsi pengambilan kebijakan dan pelaksanaannya dijalankan oleh dewan direksi, sedangkan fungsi pengawasan terhadap kebijakan yang dijalankan oleh dewan direksi dilakukan oleh dewan komisaris. Hal ini memberikan kejelasan atas garis-garis kewenangan. Tujuannya adalah untuk menghindari *conflict of interest* dan terpusatnya kekuasaan di tangan satu orang, berbeda dengan *one-tier system* yang tidak jelas siapa yang menjalankan fungsi pengawasan.

Asas-asas utama dari tata kelola perusahaan yang menjadi indikator, sebagaimana dikemukakan oleh KNKG adalah:

1. **Transparansi (*Transparency*)**

Transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Perusahaan harus

menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemilik kepentingan untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis.

Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat dibandingkan serta mudah diakses oleh pemilik kepentingan lainnya sesuai dengan haknya. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Asas ini menegaskan bagaimana bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada perusahaan dan para pemegang saham. Akuntabilitas menekankan pada pentingnya penciptaan sistem pengawasan yang efektif berdasarkan pembagian kekuasaan antara komisaris, direksi dan pemegang saham yang meliputi pengawasan, evaluasi dan pengendalian terhadap manajemen untuk meyakinkan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan pihak-pihak berkepentingan lainnya.

Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (*corporate values*), dan strategi perusahaan. Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Oleh karena itu, perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain.

3. *Responsibilitas (Responsibility)*

Responsibilitas adalah kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peundang-undangan yang memadai. Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang.

Perusahaan mempunyai tanggung jawab pengurus dalam manajemen, pengawasan manajemen serta pertanggungjawaban kepada perusahaan dan para pemegang saham. Prinsip ini diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggung jawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang, menyadari akan adanya tanggungjawab sosial, menghindari penyalahgunaan wewenang kekuasaan, menjadi profesional dan menjunjung etika dan memelihara bisnis yang sehat.

4. Independensi (*Independency*)

Perusahaan harus dikelola secara independen untuk melancarkan asas *Good Corporate Governance* (GCG) sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak diintervensi pihak lain. Asas ini menekankan bahwa pengelolaan perusahaan harus secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun, sehingga dalam pengambilan keputusan tidak akan ada tekanan atau pengaruh dari pihak manapun dan dapat menghasilkan keputusan yang obyektif.

5. Kesetaraan dan Kewajaran (*Fairness*)

Kesetaraan dan kewajaran yaitu perlakuan adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak pemegang saham yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini menekankan bahwa semua pihak, baik pemegang saham minoritas maupun asing harus diberlakukan sama atau setara.

Asas ini dapat diwujudkan dengan membuat peraturan perusahaan yang melindungi kepentingan minoritas, pedoman perilaku perusahaan dan kebijakan-kebijakan yang melindungi perusahaan dari perbuatan buruk orang dan konflik kepentingan, kemudian menetapkan bagaimana peran dan tanggung jawab organ perusahaan mulai dari dewan komisaris, direksi, komite dan sebagainya. Adanya aturan main yang jelas, maka pengelolaan perusahaan dapat dilakukan dengan baik.

2.4 Pengaruh Variabel Independen terhadap Manajemen Laba

2.4.1 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Manajemen Laba

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan pemegang saham yang terdiri dari direktur dan komisaris yang diukur dari persentase jumlah saham dari manajemen (Gul, Sajid, Razzaq, & Afzal, 2012); (Isenmila & Elijah, 2012); (Gonzales & Meca, 2013). Untuk memotivasi kinerja manajer, pada perusahaan tertentu menerapkan strategi dan kebijakan untuk memberi kesempatan pada manajer agar terlibat dalam kepemilikan saham. Keterlibatan ini pada akhirnya mampu membuat kedudukan manajer sejajar dengan pemegang saham.

Pendekatan keagenan menganggap struktur kepemilikan manajerial sebagai suatu instrumen atau alat yang digunakan untuk mengurangi konflik keagenan. Meningkatkan kepemilikan manajerial digunakan sebagai salah satu cara untuk mengatasi masalah yang ada di perusahaan. Dengan meningkatnya kepemilikan manajerial maka manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya sehingga dalam hal ini akan berdampak baik kepada perusahaan serta memenuhi keinginan dari para pemegang saham (Jensen & Meckling, 1976).

Saleh *et al.* (2005) meneliti pengaruh tata kelola perusahaan terhadap manajemen laba. Penelitian yang melibatkan variabel struktur kepemilikan dan ukuran dewan membawa kepada hasil yang signifikan negatif antara variabel kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba. Hasil penelitian ini juga konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Gonzalez dan Meca (2013) di Amerika.

Ali *et al.* (2008) meneliti hubungan antara struktur kepemilikan terhadap manajemen laba. Penelitian ini menggunakan variabel kepemilikan manajerial sebagai salah satu variabel independen yang berhubungan dengan manajemen laba. Hasil yang signifikan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi proporsi kepemilikan manajerial maka pengawasan terhadap laporan keuangan akan berjalan lebih efektif sehingga mampu mengurangi resiko terjadinya manajemen laba.

Kouki *et al.* (2011) melakukan penelitian atas pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan dengan menggunakan variabel kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba. Sehingga, semakin banyak proporsi saham yang dimiliki pihak manajerial, semakin rendah praktek manajemen laba dilakukan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Alves (2012) mengenai struktur kepemilikan dan manajemen laba pada perusahaan di Portugis yang menunjukkan hasil bahwa kepemilikan manajerial memiliki hubungan signifikan negatif terhadap manajemen laba.

Penelitian lain, Johari *et al.* (2008) yang meneliti pengaruh atas struktur kepemilikan terhadap manajemen laba, ditemukannya hasil yang signifikan positif atas kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Malaysia. Hasil yang serupa juga ditemukan dalam penelitian Wang, Chuang, dan Lee (2010) di Taiwan.

Al-Fayoumi *et al.* (2010) meneliti pengaruh atas struktur kepemilikan di antaranya adalah kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba. Penelitian

dilakukan sepanjang periode 2001 sampai dengan 2005 dengan menggunakan sampel perusahaan di Jordania, menunjukkan hasil yang serupa yaitu terdapat pengaruh signifikan positif kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba.

2.4.2 Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan terhadap Manajemen Laba

Konsentrasi kepemilikan dapat dilihat melalui jumlah persentase proporsi saham kepemilikan yang berada di atas 5% (Gonzales & Meca, 2013). Salah satu hal yang memicu mekanisme tata kelola perusahaan yang baik adalah dengan adanya kepemilikan saham yang terkonsentrasi. Penelitian sebelumnya telah membuktikan pentingnya kepemilikan saham yang terkonsentrasi guna mempermudah dalam hal pengawasan perilaku manajer dalam melakukan praktek manajemen laba, selain itu, hal ini juga dapat mengurangi timbulnya masalah biaya keagenan (Turki & Sedrine, 2012).

Abdoli (2011) melakukan penelitian tentang hubungan antara ukuran dewan komisaris dan konsentrasi kepemilikan terhadap manajemen laba. Melalui penelitian tersebut dihasilkan pengaruh yang signifikan negatif pada konsentrasi kepemilikan terhadap manajemen laba. Sehingga dapat dikatakan bahwa jika kepemilikan saham sebuah perusahaan semakin terkonsentrasi, maka dewan dan para pemilik saham akan melakukan pengawasan dan membatasi pihak manajer dalam melakukan manajemen laba.

Usman dan Yero (2012) melakukan penelitian di Nigeria. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui hubungan antara konsentrasi kepemilikan dan manajemen laba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan

yang signifikan negatif atas konsentrasi kepemilikan dan manajemen laba. Semakin besar konsentrasi kepemilikan suatu perusahaan, semakin kecil laporan laba yang dimanipulasi, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya.

Alves (2012) juga melakukan penelitian mengenai komponen struktur kepemilikan dan manajemen laba di negara Portugal. Salah satu dari komponen struktur kepemilikan berupa konsentrasi kepemilikan. Menggunakan 34 sampel data perusahaan non-finansial, hasil penelitian menunjukkan bahwa *discretionary accruals* sebagai proksi dari manajemen laba berhubungan signifikan negatif terhadap konsentrasi kepemilikan.

Jing *et al.* (2011) yang mengadakan penelitian tentang pengaruh atas konsentrasi kepemilikan terhadap manajemen laba pada perusahaan di Cina. Analisa ini dilakukan pada perusahaan non-finansial yang secara terus-menerus terdaftar di *Shanghai Stock Exchange (SHSE)* dan *Shenzhen Stock Exchange (SZSE)* sepanjang tahun 2006 hingga tahun 2008. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel konsentrasi kepemilikan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Hasil yang serupa juga ditemukan pada penelitian Mitani (2010) di Jepang.

2.4.3 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Manajemen Laba

Ukuran komisaris adalah jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan, dewan komisaris merupakan pihak dalam suatu entitas perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan

pengawasan dan memberikan nasehat kepada direksi dimana anggota dewan komisaris diangkat oleh RUPS. Berdasarkan peraturan BAPEPAM (Kep-05/PM/2001) menyatakan bahwa bursa efek wajib memiliki sekurang-kurangnya tiga orang komisaris. Dewan komisaris dalam rangka melaksanakan fungsinya, anggota Dewan Komisaris baik secara bersama-sama dan atau sendiri-sendiri berhak mempunyai akses dan memperoleh informasi tentang perusahaan secara tepat waktu dan lengkap.

Dewan Komisaris dalam fungsinya sebagai pengawas, menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengawasan atas pengelolaan perusahaan oleh Direksi, dalam rangka memperoleh pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) dari RUPS. Komisaris dalam mewakili kepentingan dari para pemegang saham, dan terkadang memiliki pengetahuan yang dalam atas kinerja, keuangan, penguasaan pangsa pasar dari organisasi tersebut.

Cornett *et al.* (2007) mengadakan penelitian untuk mengetahui pengaruh atas ukuran dewan komisaris terhadap praktek manajemen laba. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan negatif pada variabel ukuran dewan komisaris terhadap manajemen laba.

Ukuran dewan komisaris sebagaimana yang terstruktur dalam perusahaan dianggap memiliki peranan penting dalam mengawasi kinerja manajemen perusahaan (Hwang, Long & Wang, 2010). Penelitian yang dilakukan untuk menemukan hasil empiris mengenai hubungan mekanisme tata kelola perusahaan terhadap manajemen laba pada perusahaan-perusahaan terdaftar di negara Cina, menguatkan hipotesis Hwang *et al.* (2010) bahwa ukuran dewan

berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba. Menurut penelitian tersebut, semakin banyak dewan komisaris yang ada pada suatu perusahaan, semakin rendah tingkat manajemen laba dilakukan.

Abed *et al.* (2012) menganalisa hubungan manajemen laba dan karakteristik atas mekanisme tata kelola perusahaan pada perusahaan di Jordania sepanjang tahun 2006 hingga 2009. Dengan menggunakan proksi akrual diskresioner, hasil penelitian membuktikan bahwa ukuran dewan komisaris merupakan satu-satunya variabel yang memiliki hubungan signifikan negatif dengan manajemen laba.

Namun penelitian yang dilakukan oleh Moradi *et al.* (2012) yang mempelajari hubungan antara karakteristik dewan dengan manajemen laba di Iran menghasilkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara ukuran dewan komisaris terhadap manajemen laba.

2.4.4 Pengaruh Ukuran Komisaris Independen terhadap Manajemen Laba

Berdasarkan peraturan BAPEPAM melalui Kep-05/PM/2001, komisaris independen merupakan anggota komisaris yang berasal dari luar perusahaan (tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan) yang dipilih secara transparan dan independen, memiliki integritas dan kompetensi yang memadai, bebas dari pengaruh yang berhubungan dengan kepentingan pribadi atau pihak lain serta dapat bertindak secara objektif dan independen dengan berpedoman pada prinsip-

prinsip tata kelola perusahaan (transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kesetaraan dan kewajaran).

Fama dan Jensen (1980) menyatakan bahwa direksi non-eksekutif (komisaris independen) dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan antara manajer internal dan mengawasi kebijaksanaan direksi serta memberikan nasihat kepada direksi. Anggota dari komisaris independen tidak berasal dari dewan komisaris, dewan direksi ataupun para pemegang saham yang kuat. Karena komisaris independen berfungsi sebagai pemisah kepentingan antara pemegang saham dengan manajemen.

Istilah komisaris independen dapat dikatakan sebagai wakil dari pemegang saham independen (minoritas) dan juga mewakili kepentingan investor. Komisaris independen yang efektif di perusahaan publik merupakan salah satu pendorong implementasi tata kelola perusahaan yang baik. Di Indonesia saat ini, keberadaan komisaris independen sudah diatur dalam *Code Good Corporate Governance* yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG). Komisaris menurut kode tersebut, bertanggung jawab dan mempunyai kewenangan untuk mengawasi kebijakan dan kegiatan yang dilakukan oleh direksi.

Johari *et al.* (2008) melakukan penelitian atas pengaruh ukuran komisaris independen terhadap manajemen laba di Malaysia. Hasil penelitian mengemukakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan negatif pada ukuran komisaris independen terhadap manajemen laba. Semakin banyak jumlah proporsi komisaris independen akan menghasilkan pengawasan yang lebih ketat terhadap

manajemen perusahaan yang mengakibatkan berkurangnya praktek manajemen laba.

Roodposhti dan Chashmi (2011) yang menganalisa pengaruh ukuran komisaris independen terhadap manajemen laba di Iran. Manajemen laba dihitung dengan menggunakan proksi akrual diskresioner juga menghasilkan kesimpulan bahwa ukuran komisaris independen memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba.

Sun dan Liu (2013) mengadakan penelitian yang bertujuan untuk menginvestigasi interaksi hubungan antara komisaris independen dengan manajemen laba. Hasil penelitian menemukan bahwa komisaris independen memiliki hubungan yang signifikan negatif terhadap manajemen laba.

Hasil yang berbeda ditemukan oleh penelitian yang dilakukan Sukeecheep *et al.* (2013) di Thailand. Penelitian atas ukuran komisaris independen memberikan hasil yang signifikan positif terhadap manajemen laba.

Penelitian lain oleh Saleh *et al.* (2005) menyatakan bahwa semakin banyak perwakilan komisaris independen dalam suatu perusahaan tidak mampu membatasi pihak manajer maupun CEO untuk mengurangi praktek manajemen laba di Malaysia. Saleh *et al.* (2005) berpendapat bahwa *Code of Corporate Governance* Malaysia seharusnya memiliki kriteria yang lebih spesifik dalam memilih komisaris independen agar dapat memberikan pengaruh yang kuat terhadap pihak manajemen perusahaan yang bersangkutan.

Penelitian Jing *et al.* (2011) di Cina juga menemukan hasil yang sama bahwa ukuran komisaris independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap

manajemen laba. Kondisi ini menggambarkan kurang efektifnya mekanisme tata kelola perusahaan terutama mengenai fungsi dewan pada perusahaan di Cina.

Menurut Shah *et al.* (2009) yang meneliti perusahaan-perusahaan terdaftar di negara Pakistan menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan pada variabel komisaris independen terhadap manajemen laba. Hasil penelitian yang sama ditemukan di negara Indonesia bahwa tidak terdapatnya pengaruh komposisi komisaris independen terhadap manajemen laba pada perusahaan di Indonesia (Gumanti & Prasetiawati, 2011; Nugroho & Eko, 2011; Swastika, 2013).

2.4.5 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Manajemen Laba

Kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham (Jensen & Meckling, 1976). Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian.

Melalui mekanisme kepemilikan institusional, efektivitas pengelolaan sumber daya perusahaan oleh manajemen dapat diketahui dari informasi yang dihasilkan melalui reaksi pasar atas pengumuman laba. Dengan tingkat kepemilikan institusional yang tinggi maka akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistik yang dilakukan pihak manajer serta dapat meminimalisir tingkat kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen (Park & Shin, 2004).

Shah *et al.* (2009) mengadakan penelitian di Pakistan mengenai komposisi kepemilikan terhadap manajemen laba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba. Semakin besar proporsi kepemilikan saham oleh badan institusi lain, maka praktek manajemen laba dapat dikurangi.

Sebagai salah satu mediasi yang baik antara pihak manajerial, *shareholder*, dan investor, kepemilikan institusional sedang mendapat perhatian khusus di negara Pakistan, menjadikan proporsi kepemilikan saham oleh para investor cenderung mendukung mekanisme kerja tata kelola perusahaan dan membatasi tingkat manajemen laba. Atas dasar hal tersebut, Shaikh *et al.* (2012) mengadakan penelitian terhadap variabel kepemilikan institusi terhadap manajemen laba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusi memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba.

Penelitian yang dilakukan oleh Al-Zyoud (2012) yang bertujuan untuk menginvestigasi apakah perilaku manajemen laba yang diprosikan dengan akrual diskresioner memiliki hubungan dengan dewan independen dan struktur kepemilikan. Berdasarkan sampel perusahaan yang diteliti di Amerika Serikat, hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki hubungan signifikan negatif terhadap manajemen laba.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Yang *et al.* (2009) di Malaysia mengenai pengaruh struktur dewan dan kepemilikan institusional terhadap Manajemen Laba. Melalui 613 sampel yang diuji, ditemukannya hasil yang tidak signifikan antara kepemilikan institusional terhadap manajemen laba.

Hasil penelitian ini juga konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Alves (2012) yang menemukan bahwa terdapat hubungan koefisien variabel kepemilikan institusional yang negatif terhadap manajemen laba, namun tidak berpengaruh secara signifikan.

2.5 Pengaruh Variabel Kontrol terhadap Manajemen Laba

2.5.1 Skala Perusahaan

Kouki *et al.* (2011) yang meneliti atas pengaruh variabel kontrol berupa skala perusahaan terhadap manajemen laba di Amerika Serikat, mengemukakan bahwa terdapat pengaruh signifikan positif pada variabel skala perusahaan dengan manajemen laba. Sementara hasil yang berbeda ditemukan oleh Cornett *et al.* (2007) menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan negatif pada variabel skala perusahaan dengan manajemen laba.

Llukani (2013) meneliti tentang hubungan yang timbul antara manajemen laba dengan skala perusahaan pada 75 perusahaan swasta (*private company*) sepanjang tahun 2009 hingga tahun 2011 di Albania. Melalui uji regresi, ditemukannya hasil yang tidak signifikan antara manajemen laba dengan skala perusahaan, baik perusahaan besar, maupun perusahaan kecil.

Rahmani dan Akbari (2013) melakukan penelitian atas pengaruh skala perusahaan dan *capital structure* terhadap manajemen laba pada 90 perusahaan non-finansial yang terdaftar di *Tehran Stock Exchange* periode 2008 hingga 2012.

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa skala perusahaan memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba. Sebab, perusahaan yang berskala

besar biasanya memiliki internal kontrol yang kuat sehingga mencegah terjadinya manajemen laba.

2.5.2 Pertumbuhan Penjualan

Pertumbuhan penjualan merupakan salah satu indikator yang dapat mempengaruhi tingkat manajemen laba dilakukan. Perubahan penjualan dari tahun ke tahun adalah salah satu cara untuk mengukur pertumbuhan penjualan suatu perusahaan (Healy & Palepu, 2003).

Chen dan Liu (2010) melakukan penelitian mengenai pengaruh atas perubahan struktur tata kelola perusahaan terhadap fenomena manajemen laba pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek Taiwan. Salah satu variabel independen yang diambil berupa pertumbuhan penjualan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat pertumbuhan penjualan yang tinggi berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba.

Berbeda dengan penelitian Al-Fayoumi *et al.* (2010) yang melakukan penelitian dengan menggunakan variabel pertumbuhan penjualan sebagai variabel kontrol untuk menganalisa pengaruhnya terhadap manajemen laba. Hasil penelitian menemukan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan pada pertumbuhan penjualan terhadap manajemen laba.

2.5.3 Leverage

Ali, Salleh, dan Hassan (2008) melakukan penelitian tentang struktur kepemilikan dan manajemen laba dengan menggunakan *leverage* sebagai salah satu variabel kontrol dalam penelitiannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

terdapat hubungan yang signifikan positif antara *leverage* terhadap manajemen laba. Hal ini didukung oleh penelitian Alves (2012), Mitani (2010) yang menjelaskan bahwa semakin bertambahnya komposisi hutang perusahaan mengakibatkan manajer melakukan manajemen laba.

Ardison, Martinez, dan Galdi (2012) meneliti hubungan antara *leverage* dengan manajemen laba dan menemukan hasil yang tidak signifikan antara *leverage* dengan manajemen laba. Sementara hasil penelitian Nia, Vaez, dan Ahmadi (2013) menunjukkan bahwa *leverage* memiliki hubungan yang negatif signifikan terhadap manajemen laba pada perusahaan terdaftar di Iran.

2.5.4 Return on Assets (ROA)

Return on Assets (ROA) dianggap sebagai salah satu indikator yang merupakan rasio penilaian atas baik atau buruknya kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan dipengaruhi oleh ROA yang mengakibatkan dilakukannya atau tidak dilakukannya praktek manajemen laba (Kothari, Leone & Weasley, 2005).

Penelitian Xia, Qiang, dan Xin (2011) membuktikan pernyataan tersebut dengan menguji variabel ROA sebagai salah satu variabel kontrol yang mampu mempengaruhi tingkat manajemen laba. Hasil penelitian ditemukan adanya pengaruh signifikan negatif pada ROA terhadap manajemen laba. Hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Hwang, Long, dan Wang (2010) yang menunjukkan bahwa variabel kontrol ROA berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba.

Penelitian lain, Usman dan Yero (2012) mengadakan penelitian mengenai konsentrasi kepemilikan dan manajemen laba di Nigeria. Dengan menggunakan *Return on Assets* (ROA) sebagai variabel kontrol, ditemukan hasil yang signifikan positif terhadap manajemen laba. Hasil yang konsisten juga ditemukan pada penelitian yang dilakukan oleh Al-Zyoud (2012) di Amerika Serikat, Ali *et al.* (2008), dan Moradi *et al.* (2012).

2.6 Perumusan Model dan Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian di atas maka model penelitian yang terdapat dalam penelitian ini disajikan pada Gambar 2.3.

Gambar 2.3 Model pengaruh kepemilikan manajerial, konsentrasi kepemilikan, ukuran dewan komisaris, ukuran komisaris independen dan kepemilikan institusional terhadap manajemen laba, sumber: Peneliti, 2015.

Berdasarkan kerangka model di atas, maka dapat diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₁ = Kepemilikan Manajerial berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba

H₂ = Konsentrasi kepemilikan berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba

H₃ = Ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba

H₄ = Ukuran komisaris independen berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba

H₅ = Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba